

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pidana yang Melakukan Pencemaran Lingkungan

KATA KUNCI

Penegakan, hukum,
pelaku, pidana, sampah

Tamaulina Br Sembiring, Yaumil Adli, Muhammad Muqsith Lubis, Rio Aginta Ginting, Adillah Fajar Siddiq

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: yaumiladli07@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah di Indonesia tidak sesuai dengan Undang-Undang sampah yang sudah dibuat oleh pemerintah. Banyak sampah yang masih terlihat berserakan di publik. Desa yang kotor dapat menimbulkan penyakit dan pencemaran lingkungan. Jika semua pihak saling bekerjasama dengan baik maka permasalahan terhadap sampah dapat teratasi maka suatu desa akan tercipta suatu lingkungan yang bersih.

This is an open access article under the Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



Copyright holders:

Tamaulina Br Sembiring, Yaumil Adli, Muhammad Muqsith Lubis, Rio Aginta Ginting, Adillah Fajar Siddiq (2023)

First publication right:

Journal of Mandalika Social Science

Volume 1 Nomor 2 2023

PENDAHULUAN

Sampah merupakan hal yang lumrah di Medan Krio. Penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah harus ditegakkan agar patuh terhadap aturan. Proses penegakan hukum melibatkan semua pihak baik itu pihak pemerintah maupun masyarakat. Dalam rangka mengurangi pencemaran lingkungan berupa sampah pemerintah sudah menyediakan bak sampah tapi dengan jumlah yang sedikit. Dengan bertambahnya jumlah masyarakat di suatu desa maka jumlah sampah rumah tangga masyarakat juga terus bertambah sehingga menjadi suatu masalah yang harus diatasi. Sampah menjadi masalah terutama di desa Medan Krio. Desa pasti bersih jika sesama masyarakat saling peduli terhadap lingkungannya. Banyaknya sampah yang berserakan di jalanan dapat mengakibatkan gangguan pernapasan. Selain di Indonesia sampah juga menjadi topik masalah di luar negeri. Masyarakat masih buang sampah sembarangan ada yang di lapangan bola kaki, parit dan sungai. Di Medan Krio juga terdapat pengusaha yang tidak peduli terhadap kesehatan pembelinya mereka menjual makanan atau minuman dekat dengan

tempat pembuangan sampah. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan sampah. Perangkat desa di Medan Krio harus saling bekerjasama dengan dinas kebersihan dalam melakukan pengelolaan sampah. Pemerintah terus melakukan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan sampah berupa bak sampah, mobil pengangkut sampah, pekerja yang ditugaskan ke desa-desa untuk membersihkan sampah. Jika menurut undang-undang pelaku pembuangan sampah sembarangan dapat dikenakan pidana dan denda tapi pada sampai saat ini aturan yang sudah dibuat tidak ditaati oleh masyarakat dan masih banyak yang melanggar aturan tersebut. Pemerintah masih terkendala di lahan dalam membuat tempat pembuangan akhir sampah yang saat ini lahannya masih belum dijual kepada Pemerintah dari pemilik pertama lahan tersebut. Permasalahan yang akan dibahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku yang membuang sampah sembarangan di Medan Krio.

Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dibahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku yang membuang sampah sembarangan di Medan Krio.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah perangkat desa di Medan Krio memberikan sanksi pidana kepada warga jika melanggar aturan.
2. Untuk mengetahui bagaimana solusi dari Pemerintah dalam mengatasi pencemaran lingkungan berupa sampah di Medan Krio

METODE

Mahasiswa panca budi melakukan studi lapangan di desa Medan Krio pada tanggal 20 desember 2023 dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap sampah melalui perangkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dari sekretaris desa di desa Medan Krio bahwasannya mereka belum menerapkan sanksi pidana melainkan hanya menerapkan sanksi sosial kepada masyarakat yaitu membersihkan sampah secara mandiri bagi masyarakat yang ketahuan membuang sampah secara sembarangan dan pemerintahan di Medan Krio sudah memfasilitasi sarana dan prasarana pembuangan sampah berupa bank sampah dan Pemerintah menerapkan distribusi yang harus ditaati oleh masyarakat di setiap kecamatan di Medan Krio.

KESIMPULAN

Semua pihak harus saling membantu dalam mengatasi masalah berupa sampah. Fasilitas juga harus di tingkatkan lagi seperti menyediakan bak sampah yang lebih banyak

baik di jalan lintas Medan krio maupun di desanya karena jika tidak disediakan warga akan membuang sampah sembarangan. Kemudian dinas kebersihan harus rutin membersihkan bak sampah agar tidak melebihi kapasitas baknya dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang sampah yang dapat digunakan kembali seperti botol plastik yang dapat dikumpulkan kemudian dibuat untuk kerajinan tangan seperti gelang tangan atau hiasan dinding.

REFERENSI

- Nur Yanto, 2018, Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia, Bogo. Satjipto Rahardjo, (2000) Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ridwan HR. (2011). Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. Mazahib, Vol. 15 No.1, hlm. 20-41.
- Mosal, M. M. (2013). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol. 1 No.4, hlm. 1-9.